

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
BPMP PROVINSI NTB



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 REVISI AGUSTUS 2023

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



<https://bpmptnb.kemdikbud.go.id/>

**RENCANA STRATEGIS
BALAI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020 – 2024
REVISI AGUSTUS 2023**



KATA PENGANTAR.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan proses reviu Rencana Strategis (Renstra) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2020-2024 ini secara baik dan lancar.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang selanjutnya disebut BPMP Provinsi NTB adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi. Pelaksanaan tugas fungsi tersebut merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Naskah Rencana Strategis ini disusun sebagai upaya untuk memantapkan sistem pengelolaan, pengendalian, dan pemantauan program-program strategis lembaga sehingga program-program strategis tersebut dapat diimplementasikan sesuai rencana. Selain itu, naskah ini juga disusun sebagai upaya lembaga untuk menyelaraskan program-program BPMP Provinsi NTB dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dengan keselarasan ini diharapkan program-program yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan di daerah akan dapat diimplementasikan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai sasaran. Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat secara aktif dalam penyusunan naskah renstra.

Mataram, 11 Agustus 2023

Kepala,



Drs. H. Muh. Irfan, M.M.

NIP. 196606201992031003

DAFTAR ISI.

i	Halaman Judul.
iii	Kata Pengantar.
iv	Daftar Isi.

PENDAHULUAN

BAB I

Latar Belakang.	1A	halaman 1
Gambaran Umum Pendidikan di Provinsi NTB.	1B	2
Tata Kelola.	1C	21

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

halaman 23	2A	Visi BPMP Provinsi NTB
24	2B	Dukungan BPMP Provinsi NTB
24	2C	Tujuan BPMP Provinsi NTB
25	2D	Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi NTB

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.

BAB III

Arah Kebijakan dan Strategi	3A	Halaman 27
Kerangka Regulasi	3B	29
Kerangka Kelembagaan	3C	29

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

halaman 39	A.	Target Kinerja.
40	B.	Kerangka Pendanaan.

PENUTUP.

BAB V

Penutup	Halaman 43
---------	------------

halaman 45	Lampiran.
------------	-----------

BAB I. PENDAHULUAN

1A Latar Belakang

BPMP Provinsi NTB sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah berkewajiban mewujudkan pencapaian target kinerja unit utamanya. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Untuk itu, BPMP Provinsi NTB perlu menerjemahkan upaya-upaya tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen Renstra, yang akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas di provinsi dan 10 kabupaten/kota, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen Renstra BPMP Provinsi NTB Tahun 2020-2024 ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian menyikapi restrukturisasi fungsi pada Kemdikbudristek dan perubahan nomenklatur LPMP ke BPMP. Selain untuk menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan Renstra juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara optimal di sekolah. Dengan demikian, perubahan Renstra ini juga akan membawa upaya-upaya menekan dampak turunnya hasil belajar dan karakter siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi. Upaya ini akan dilakukan – salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Renstra BPMP Provinsi NTB Tahun 2020-2024 ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra ini lebih mengkrystalkan peran BPMP Provinsi NTB ke Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dokumen Renstra BPMP Provinsi NTB Tahun 2020-2024 ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian menyikapi restrukturisasi fungsi pada Kemdikbudristek.

1B Gambaran Umum Pendidikan di Provinsi NTB

Terdapat 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang menjadi wilayah kerja BPMP Provinsi NTB. Jumlah Satuan Pendidikan yang terdapat di Provinsi NTB adalah 10.866, yang terdiri dari 4112 sekolah negeri dan 6754 sekolah swasta, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Satuan Pendidikan di provinsi NTB

No	Kabupaten/Kota	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	Kab. Lombok Timur	2,354	559	451	2	55	49	1	777	275	77	100	8
2	Kab. Lombok Tengah	2,058	377	580	1	24	83	1	630	213	68	76	5
3	Kab. Bima	1,568	354	423	3	27	98	1	423	135	58	32	14
4	Kab. Lombok Barat	1,207	145	420	3	14	58	1	372	106	38	47	3
5	Kab. Sumbawa	1,187	207	368	1	30	39	1	373	113	30	23	2
6	Kab. Dompu	738	89	205	3	25	57	1	227	70	29	24	8
7	Kota Mataram	580	144	122	12	3	8	1	178	49	35	24	4
8	Kab. Lombok Utara	475	110	106	2	0	20	1	161	43	15	14	3
9	Kab. Sumbawa Barat	350	108	48	3	14	6	1	111	40	12	6	1
10	Kota Bima	349	98	65	2	12	31	1	82	24	17	11	6
Total	Total	10,866	2,191	2,788	32	204	449	10	3,334	1,068	379	357	54

Sumber Data: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/230000> per tanggal 10 Agustus 2023

Jumlah guru yang terdapat di Provinsi NTB dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Guru Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Wilayah	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	Kab. Lombok Timur	16088	1279	785	4	122	146	7	6524	4275	1396	1.48	70
2	Kab. Bima	14180	349	298	3	13	34	0	5992	4009	2387	912	183
3	Kab. Lombok Tengah	11057	615	662	1	27	120	14	4989	2399	1106	1038	86
4	Kab. Lombok Barat	7141	216	687	2	23	93	14	3234	1472	561	787	52
5	Kab. Sumbawa	6862	376	461	1	38	29	14	3076	1617	666	541	43
6	Kab. Dompu	6344	94	241	2	38	110	9	2.65	1761	898	489	52
7	Kota Mataram	5094	327	116	9	0	22	13	2.21	1077	561	692	67
8	Kota Bima	3757	192	64	1	16	16	16	1699	787	448	405	113
9	Kab. Lombok Utara	2874	214	188	5	0	56	6	1316	573	238	264	14
10	Kab. Sumbawa Barat	2567	243	40	0	18	0	1	1203	693	232	129	8
Total	Total	75964	3905	3542	28	295	626	94	32893	18663	8493	6737	688

Sumber Data: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/230000> per tanggal 10 Agustus 2023

Jumlah pegawai (Tenaga Kependidikan) yang terdapat di Provinsi NTB dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Data Pegawai (Tenaga Kependidikan) Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Wilayah	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	Kab. Lombok Timur	3778	417	321	4	45	35	3	1330	892	361	351	19
2	Kab. Lombok Tengah	2363	212	271	1	10	31	8	776	560	265	203	26
3	Kab. Bima	2361	131	136	1	4	19	0	694	726	459	144	47
4	Kab. Lombok Barat	2169	103	286	4	8	18	13	737	514	222	243	21
5	Kab. Sumbawa	1768	135	210	1	19	13	1	570	429	238	146	6
6	Kota Mataram	1464	98	45	3	0	4	6	524	369	209	187	19
7	Kab. Dompu	1255	34	98	1	15	34	9	348	362	212	129	13
8	Kab. Sumbawa Barat	926	163	31	0	11	1	0	399	220	63	34	4
9	Kab. Lombok Utara	882	76	70	1	0	13	6	271	224	111	104	6
10	Kota Bima	846	58	22	1	4	4	10	295	221	102	104	25
Total	Total	17812	1427	1490	17	116	172	56	5944	4517	2242	1645	186

Sumber Data: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/230000> per tanggal 10 Agustus 2023

Jumlah rombel yang terdapat di Provinsi NTB dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Data Rombel Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Wilayah	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kab. Lombok Timur	9525	967	679	5	107	335	4	4500	1469	638	641	180
2	Kab. Lombok Tengah	7028	550	719	2	32	234	3	3446	1013	484	403	142
3	Kab. Lombok Barat	4811	170	691	5	22	163	16	2421	668	264	313	78
4	Kab. Sumbawa	4422	321	488	2	35	129	10	2147	647	328	237	78
5	Kab. Bima	4409	230	270	3	9	105	0	2144	638	552	270	188
6	Kota Mataram	3245	221	85	6	0	74	33	1581	558	284	313	90
7	Kab. Dompu	2551	58	211	1	36	221	5	1132	378	279	175	55
8	Kab. Lombok Utara	1887	163	143	1	0	103	6	961	255	130	105	20
9	Kota Bima	1491	115	61	1	13	35	9	670	189	142	129	127
10	Kab. Sumbawa Barat	1489	176	35	0	18	9	0	807	215	123	81	25
Total	Total	40858	2971	3382	26	272	1408	86	19809	6030	3224	2667	983

Sumber Data: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/230000> per tanggal 10 Agustus 2023

Jumlah Peserta Didik yang terdapat di Provinsi NTB dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Data Peserta Didik Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Wilayah	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	Kab. Lombok Timur	205941	15495	12659	44	1852	7002	76	97989	36616	19105	14514	589
2	Kab. Lombok Tengah	151715	9019	13735	21	490	5054	29	73764	24866	14429	9811	497
3	Kab. Lombok Barat	107941	2869	10660	66	334	4004	203	56062	17755	8100	7551	337
4	Kab. Sumbawa	90439	4738	8478	33	648	2314	191	41532	16459	9883	5888	275
5	Kab. Bima	89348	4695	6487	62	180	2696	0	38714	14943	16267	4521	783
6	Kota Mataram	81716	3117	943	52	0	1103	556	40658	17912	8325	8654	396
7	Kab. Dompu	56506	1226	4677	19	639	6559	86	21011	9765	8249	4014	261
8	Kab. Lombok Utara	41619	2234	2028	23	0	2985	312	20741	6707	4025	2466	98
9	Kota Bima	31196	1627	1127	23	387	1027	132	14320	5009	4247	2942	355
10	Kab. Sumbawa Barat	29755	2404	486	0	243	152	0	16064	5104	3712	1536	54
Total	Total	886176	47424	61280	343	4773	32896	1585	420855	155136	96342	61897	3645

Sumber Data: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/230000> per tanggal 10 Agustus 2023

Berikut gambaran umum kondisi pendidikan di Provinsi NTB dalam waktu 5 tahun.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk

yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

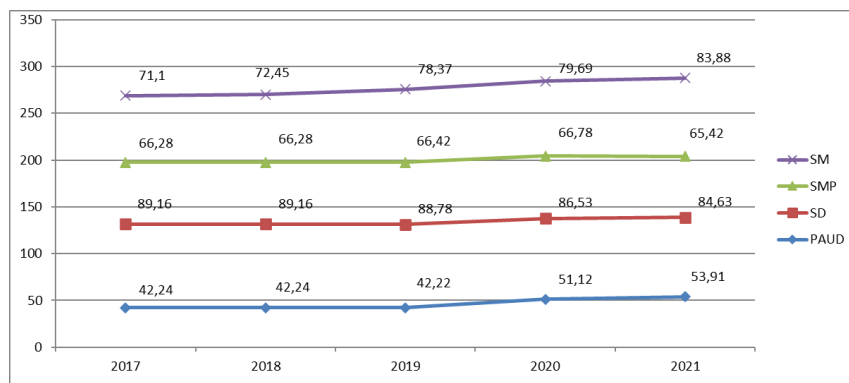
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan Tahun 2021, dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 terdapat peningkatan APK di jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Sekolah Menengah, dan penurunan APK di Jenjang Pendidikan SD. Perkembangan APK di NTB disajikan melalui tabel berikut ini.

Tabel 1.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen di Provinsi NTB Tahun 2017-2021

No.	Wilayah	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)																			
		2017				2018				2019				2020				2021			
		PAUD	SD	SMP	SM	PAUD	SD	SMP	SM	PAUD	SD	SMP	SM	PAUD	SD	SMP	SM	PAUD	SD	SMP	SM
1	Kab. Lombok Barat	34,35	113,9	105,44	87,46	34,35	113,9	105,44	86	27,15	112,34	109,31	95,79	43,13	108,38	108,98	101,94	47,86	108,55	111,4	110,8
2	Kab. Lombok Tengah	64,88	110,7	110,36	97,26	64,88	110,7	110,36	99,64	52,8	107,71	107,42	100,14	73,07	109,06	107,43	108,56	78,11	108,81	108,25	112,93
3	Kab. Lombok Timur	79,45	108,71	104,64	93,19	79,45	108,71	104,64	90,43	69,79	106,91	105,75	94,32	103,25	105,55	108,11	97,42	105,74	104,33	109,6	100,85
4	Kab. Sumbawa	44,28	92,7	109,21	99,7	44,28	92,7	109,21	104,42	42,44	94,91	101,09	105,56	52,09	93,62	104,81	111,54	56,13	91,79	102,97	119,9
5	Kab. Dompu	22,42	114,04	111,79	104,67	22,42	114,04	111,79	110,59	22,95	116,1	114,03	117,01	34,3	109,6	109,5	123,43	37,65	104,8	108,26	121,24
6	Kab. Bima	57,85	100,3	101,19	108,05	57,85	100,3	101,19	109,22	46,15	100,9	101,25	111,39	71,2	102,68	103,85	113,23	72,74	98,4	100,33	111,81
7	Kab. Sumbawa Barat	60,1	97,49	107,06	98,53	60,1	97,49	107,06	97,89	50,37	98,43	99,52	102,74	56,44	96,46	105,63	103,65	54,49	94,87	111,24	109,13
8	Kab. Lombok Utara	21,9	93,95	107,07	98,44	21,9	93,95	107,07	104,06	21,32	95,39	104,11	112,71	28,81	96,52	104,19	118,87	30,46	97,19	109,89	126,11
9	Kota Mataram	34,37	107,31	104,41	106,26	34,37	107,31	104,41	105,88	32,78	107,22	111,05	108,24	35,68	104,48	108,93	112,65	35,26	102,83	105,87	122,63
10	Kota Bima	49,88	100,94	109,75	98,73	49,88	100,94	109,75	99,02	31,6	104,95	119,97	104,11	48,34	102,46	109,18	108,18	51,77	100,96	105,11	117,74
	Nusa Tenggara Barat	42,24	89,16	66,28	71,1	42,24	89,16	66,28	72,45	42,22	88,78	66,42	78,37	51,12	86,53	66,78	79,69	53,91	84,63	65,42	83,88

Sumber: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/2022>

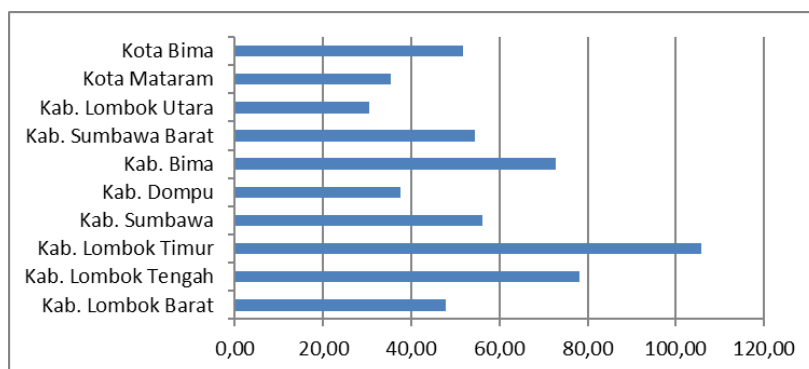
Perkembangan APK pada setiap jenjang pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun disajikan dalam bentuk grafik berikut:



Grafik 1.1. APK PAUD, SD, SMP, SM di Provinsi NTB Tahun 2017-2021

Sumber: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/2022>

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2017 s.d. 2021 indeks APK jenjang Paud, pendidikan dasar dan menengah di Provinsi NTB setiap tahun mengalami Kenaikan. Sedang jenjang Sekolah menengah fluktuatif.

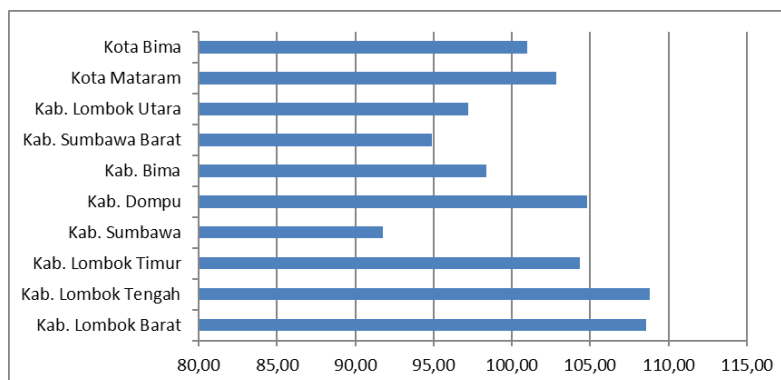


Grafik 1.2. APK Jenjang PAUD Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/2022>

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa indeks APK PAUD di kabupaten dan kota dalam Provinsi NTB beragam. Indeks APK PAUD tertinggi berada di Kabupaten Lombok Timur, yaitu sebesar 105,74 Indeks APK PAUD terendah berada di Kabupaten Lombok Utara, yaitu sebesar 30,46.

Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2021), APK SD kabupaten/kota dalam Provinsi NTB Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut.

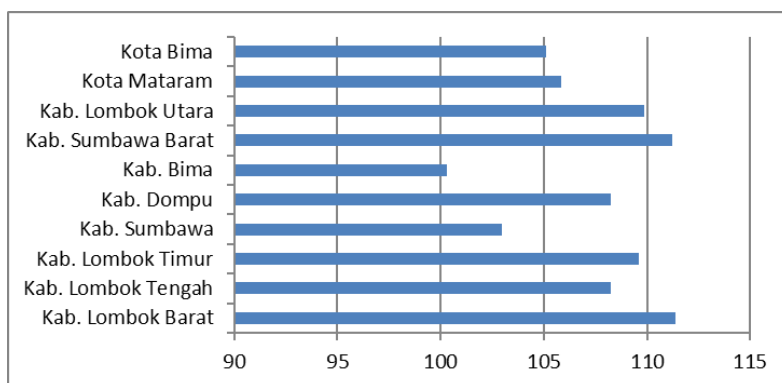


Grafik 1.3. APK Jenjang SD Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/2022>

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa indeks APK SD di kabupaten /kota dalam Provinsi NTB juga beragam. Indeks APK SD tertinggi berada di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu sebesar 108,81 Indeks APK SD terendah berada di Kabupaten Sumbawa , yaitu sebesar 91,79.

Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2021), APK pada jenjang Pendidikan Menengah kabupaten/kota dalam Provinsi NTB Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut.

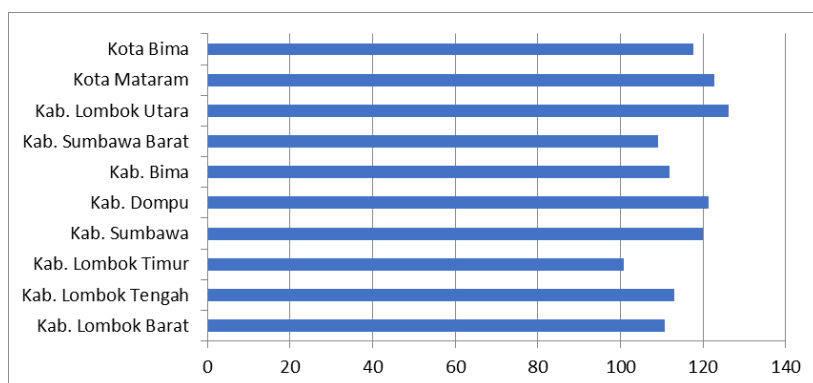


Grafik 1.4. APK Jenjang SMP Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa indeks APK jenjang SMP di kabupaten dan kota dalam Provinsi NTB juga beragam. Indeks APK jenjang SMP tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Utara, yaitu sebesar 109,89 Indeks APK jenjang SMP terendah berada di Kabupaten Bima, yaitu sebesar 100,33.

Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2021), APK pada jenjang Pendidikan Menengah kabupaten/kota dalam Provinsi NTB Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut.



Grafik 1.5. APK Jenjang Sekolah Menengah Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa indeks APK jenjang Sekolah Menengah di kabupaten dan kota dalam Provinsi NTB juga beragam. Indeks APK jenjang Sekolah menengah tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Utara, yaitu sebesar 126,11 Indeks APK jenjang Sekolah Menengah terendah berada di Kabupaten Lombok Timur, yaitu sebesar 100,85.

2. Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk

mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Apabila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

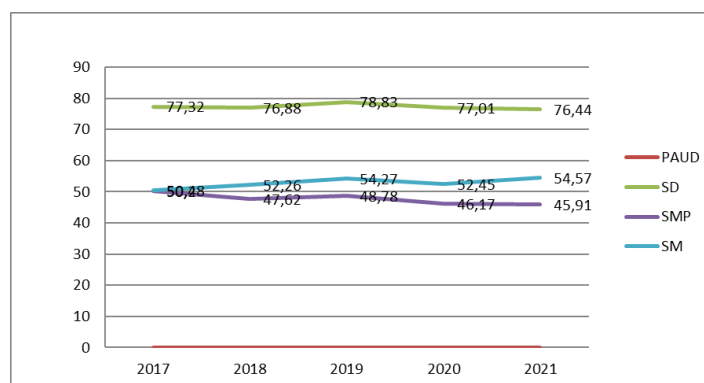
Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya kesalahan perkiraan karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Sebagai contoh, seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam APM karena usianya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Tabel lengkap perkembangan APM Kabupaten/Kota se-NTB selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.7. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen NTB Tahun 2017-2021

No.	Wilayah	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)																			
		2017				2018				2019				2020				2021			
		PAUD	SD	SMP	SM	PAUD	SD	SMP	SM	PAUD	SD	SMP	SM	PAUD	SD	SMP	SM	PAUD	SD	SMP	SM
1	Kab. Lombok Barat	0,00	95,51	81,53	64,68	0,00	95,88	78,44	67,41	0,00	99,14	78,54	70,61	0,00	97,61	79,32	73,52	0,00	99,39	81,19	77,39
2	Kab. Lombok Tengah	0,00	96,76	85,39	70,47	0,00	97,31	82,54	74,34	0,00	97,39	75,09	74,02	0,00	98,3	77,6	75,47	0,00	98,25	75,8	74,05
3	Kab. Lombok Timur	0,00	94,01	81,3	68,87	0,00	94,37	78,63	69,57	0,00	94,56	77,97	70,39	0,00	93,91	79,56	71,89	0,00	94,34	79,5	71,31
4	Kab. Sumbawa	0,00	83,9	84,25	74,96	0,00	83,59	82,4	77,87	0,00	84,77	74,21	76,37	0,00	85,98	76,48	77,14	0,00	85,26	77,83	82,08
5	Kab. Dompu	0,00	95,35	76,38	71,74	0,00	91,49	74,13	72,03	0,00	97,17	77,71	74,3	0,00	90,44	70,05	69,32	0,00	84,19	64,83	70,13
6	Kab. Bima	0,00	87,73	71,31	65,37	0,00	83,88	65,89	65,05	0,00	89,88	69,26	70,67	0,00	86,54	63,02	61,22	0,00	83,05	60,76	59,25
7	Kab. Sumbawa Barat	0,00	86,97	84,98	74,56	0,00	88,59	84,59	81,79	0,00	86,35	69,02	69,36	0,00	88,79	82,93	78,81	0,00	88,26	88,93	79,24
8	Kab. Lombok Utara	0,00	84,08	80,14	72,7	0,00	83,26	79,09	81,02	0,00	84,35	68,61	79,18	0,00	87,27	77,79	86,63	0,00	88,48	77,77	88,1
9	Kota Mataram	0,00	97,24	87,21	83,95	0,00	98	83,73	87,76	0,00	95,47	83,95	81,47	0,00	97,66	87,08	88	0,00	96,44	87,48	93,79
10	Kota Bima	0,00	89,01	80,04	69,86	0,00	85,99	78,61	68,57	0,00	97,13	90,46	74,46	0,00	88,81	72,69	69,64	0,00	88,45	67,54	67,85
	Nusa Tenggara Barat	0,00	77,32	50,2	50,48	0,00	76,88	47,62	52,26	0,00	78,83	48,78	54,27	0,00	77,01	46,17	52,45	0,00	76,44	45,91	54,57

Sumber: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/>

Perkembangan APM pada setiap jenjang pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun disajikan dalam bentuk grafik berikut.

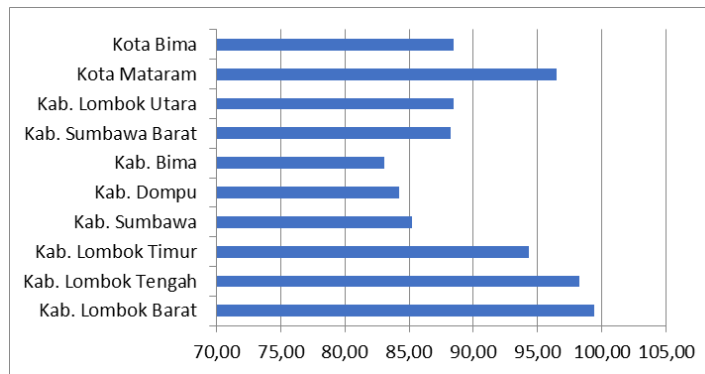


Grafik 1.6. APM PAUD, SD, SMP, SMA/SMK NTB Tahun 2017-2021

Sumber: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/2022>

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2017 s.d. 2021 indeks APM jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi NTB setiap tahun mengalami fluktuatif.

Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2021), Angka Partisipasi Murni SD kabupaten/ kota dalam Provinsi NTB Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut.

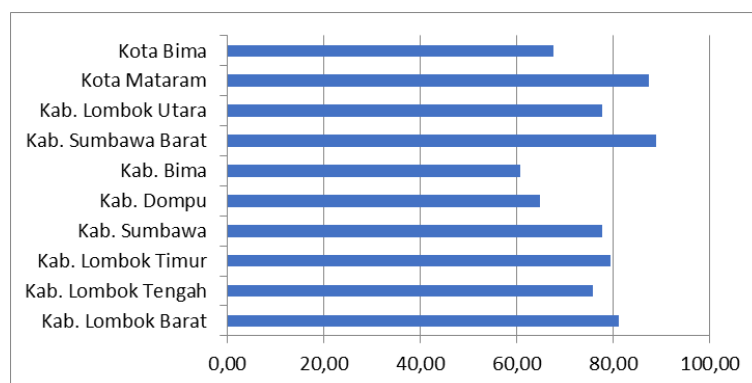


Grafik 1.7. Angka Partisipasi Murni Jenjang SD Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/2022>

Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat bahwa indeks APM jenjang pendidikan SD di Provinsi NTB menunjukkan adanya variasi pencapaian indeksnya. Indeks APM tertinggi terdapat di Kab Lombok Barat, yaitu dengan indeks 99,39, sedangkan indeks terendah terdapat di Kabupaten Bima, yaitu dengan indeks 83,05.

Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2021), APM SMP kabupaten/kota dalam Provinsi NTB Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut.



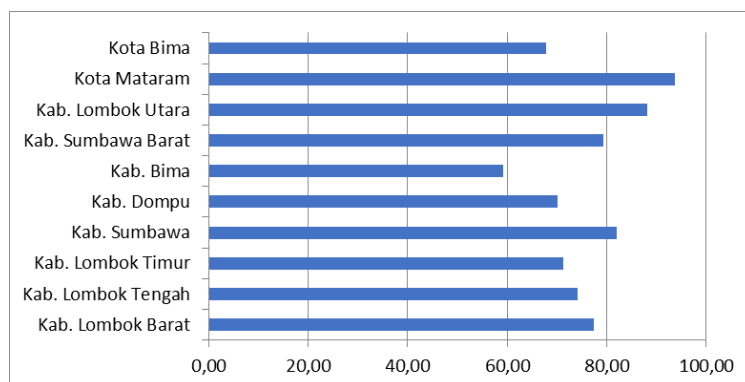
Grafik 1.8. Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP Kabupaten /Kota Tahun 2021

Sumber: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/2022>

Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat bahwa indeks APM jenjang pendidikan SMP di Provinsi NTB menunjukkan adanya variasi pencapaian indeksnya. Indeks APM tertinggi terdapat di Kabupaten

Sumbawa Barat, yaitu dengan indeks 88,93, sedangkan indeks terendah terdapat di Kabupaten Bima, yaitu dengan indeks 60,76.

Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2021), APM SM kabupaten/kota dalam Provinsi NTB Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut.



Grafik 1.9. Angka Partisipasi Murni Jenjang SM Kabupaten /Kota Tahun 2021

Sumber: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/2022>

Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat bahwa indeks APM jenjang pendidikan Sekoah menengah di Provinsi NTB menunjukkan adanya variasi pencapaian indeksnya. Indeks APM tertinggi terdapat di Kota Mataram, yaitu dengan indeks 72,85, sedangkan indeks terendah terdapat di Kabupaten Kabupaten Bima, yaitu dengan indeks 59,25.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Tinggi rendahnya angka partisipasi sekolah tentunya di pengaruhi oleh adanya Isu Partisipasi Pendidikan Lintas sektor yang meliputi kelompok umur, iklim, gender dan letak geografis. Adapun data angka partisipasi sekolah di Provinsi NTB sebagai berikut:

Tabel 1.8. Data Angka Partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur di Provinsi NTB 2017-2021

NO	USIA sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
1	7-12	99.43	99.43	99.46	99.52	99.52
2	13-15	97.69	97.72	97.92	98.32	98.34
3	16-18	76.61	76.89	77.51	77.64	77.49
4	19-24	28.52	25.74	25.59	25.97	26.22

Sumber: <https://www.bps.go.id/2022>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata partisipasi sekolah di Provinsi NTB untuk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun mengalami kenaikan, tetapi untuk usia 19-24 tahun cenderung mengalami penurunan.

4. Daftar Sekolah yang telah mendaftar Kurikulum Merdeka

Paradigma Pembelajaran baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Tabel 1.9. Data Sekolah yang telah Mendaftar IKM Tahun 2022 Kabupaten/Kota se-NTB

NO	KABUPATEN/KOTA	TK	SD	SMP	SMA	SMK	TOTAL
1	Kab. Sumbawa	33	319	54	5	2	413
2	Kab. Lombok Timur	74	420	194	9	5	702
3	Kab. Sumbawa Barat	4	79	30	6	3	122
4	Kota Bima		59	16	1	4	80
5	Kab. Lombok Utara	5	107	17	3	1	133
6	Kab. Lombok Tengah	180	544	145	24	11	904
7	Kab. Lombok Barat	13	95	15	4	4	131
8	Kota Mataram	25	116	25	14	6	186
9	Kab. Bima	2	215	42	9	3	271
10	Kab. Dompu	35	168	47	5	5	260
	TOTAL	371	2.122	585	80	44	3.202

Sumber data: Ditjen GTK per 30 Juni 2022

Data diatas adalah data sekolah yang telah mendaftar dalam pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka kabupaten/Kota Se Provinsi NTB tahun 2022.

Tabel 1.10. Data Sekolah di Provinsi NTB Menurut Kriteria Pilihan

NO	KAB/KOTA	Mandiri Belajar	Mandiri Berubah	Mandiri Berbagi
1	Kab. Sumbawa	223	186	4
2	Kab. Lombok Timur	405	288	9
3	Kab. Sumbawa Barat	21	99	2
4	Kota Bima	6	72	2
5	Kab. Lombok Utara	11	121	1
6	Kab. Lombok Tengah	245	643	16
7	Kab. Lombok Barat	63	63	5
8	Kota Mataram	96	72	18
9	Kab. Bima	181	87	3
10	Kab. Dompu	44	212	4
11	NTB Total	1.295	1.843	64

Sumber data: Ditjen GTK per 30 Juni 2022

Data diatas adalah data sekolah yang telah mendaftar dalam pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan pilihan Kurikulum Merdeka kabupaten/Kota Se Provinsi NTB tahun 2022.

5. Capaian Periode Renstra 2015-2019

Gambaran capaian SNP satuan pendidikan di Provinsi NTB sebagai berikut:

a. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

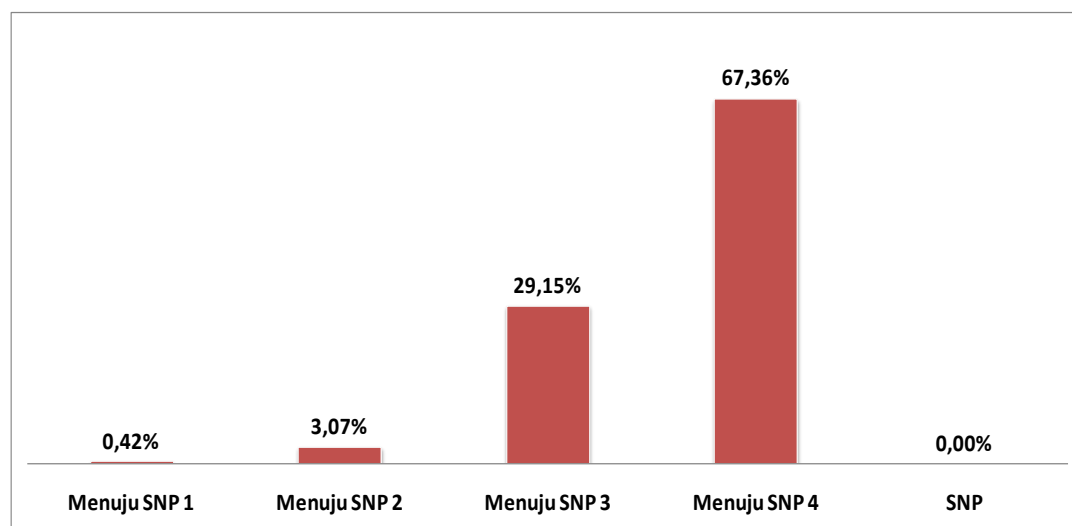
Gambaran umum kondisi pendidikan jenjang Sekolah Dasar.

Tabel 1.11. Skor Peta Capaian Jenjang SD Provinsi NTB Tahun 2017

Wilayah	Rata-Rata Capaian	Kelompok	Keterangan
Kab. Bima	5,21	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Dompu	4,73	★★★	Menuju SNP 3
Kab. Lombok Barat	5,21	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Lombok Tengah	5,05	★★★	Menuju SNP 3
Kab. Lombok Timur	5,15	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Lombok Utara	5,12	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Sumbawa	5,17	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Sumbawa Barat	5,23	★★★★	Menuju SNP 4
Kota Bima	5,23	★★★★	Menuju SNP 4
Kota Mataram	5,29	★★★★	Menuju SNP 4
NTB	5,14	★★★★	Menuju SNP 4
Nasional	5,15	★★★★	Menuju SNP 4

Sumber: Aplikasi Rapor PMP 2017

Bila dilihat dari perolehan tiap sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan dalam gambar dibawah ini.



Grafik 1.10. Persentase Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP Jenjang SD Tahun 2017

Sumber: Aplikasi Rapor PMP 2017

Nilai capaian mutu jenjang SD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masing-masing standar ditampilkan dalam tabel 1.12 berikut ini.

Tabel 1.12. Nilai Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SD Provinsi NTB Tahun 2017

SNP	Nilai Mutu	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	6,11	Menuju SNP 4
Standar Isi	5,60	Menuju SNP 4
Standar Proses	6,33	Menuju SNP 4
Standar Penilaian	5,58	Menuju SNP 4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,87	Menuju SNP 2
Standar Sarana dan Prasarana	2,76	Menuju SNP 2
Standar Pengelolaan	5,53	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan	6,30	Menuju SNP 4
Rata-Rata Skor	5,14	Menuju SNP 4

Sumber: Olahan Rapor PMP 2017

b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

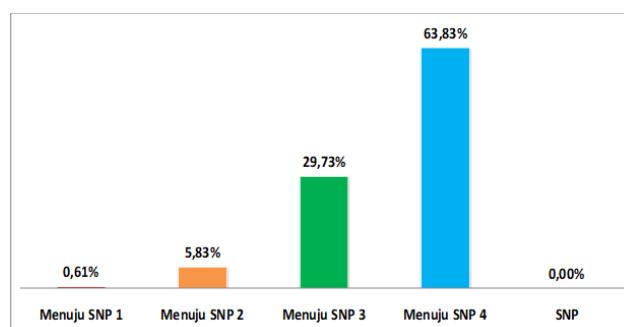
Gambaran umum kondisi pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Tabel 1.13. Skor Peta Capaian Jenjang SMP Provinsi NTB Tahun 2017

Wilayah	Rata-Rata Capaian	Kelompok	Keterangan
Kab. Bima	5,29	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Dompu	4,75	★★★	Menuju SNP 3
Kab. Lombok Barat	5,06	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Lombok Tengah	4,96	★★★	Menuju SNP 3
Kab. Lombok Timur	4,97	★★★	Menuju SNP 3
Kab. Lombok Utara	5,05	★★★	Menuju SNP 3
Kab. Sumbawa	5,17	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Sumbawa Barat	5,18	★★★★	Menuju SNP 4
Kota Bima	5,12	★★★★	Menuju SNP 4
Kota Mataram	5,22	★★★★	Menuju SNP 4
NTB	5,06	★★★★	Menuju SNP 4
Nasional	5,11	★★★★	Menuju SNP 4

Sumber: Aplikasi Rapor PMP 2017

Bila dilihat dari perolehan tiap sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan dalam gambar dibawah ini.



Grafik 1.11. Persentase Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP Jenjang SMP Tahun 2017

Sumber: Aplikasi Rapor PMP 2017

Nilai capaian mutu jenjang SMP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masing-masing standar ditampilkan dalam tabel 1.14 berikut ini.

Tabel 1.14. Nilai Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMP Provinsi NTB Tahun 2017

SNP	Nilai Mutu	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	6,18	Menuju SNP 4
Standar Isi	5,34	Menuju SNP 4
Standar Proses	6,24	Menuju SNP 4
Standar Penilaian	5,53	Menuju SNP 4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,02	Menuju SNP 2
Standar Sarana dan Prasarana	2,68	Menuju SNP 2
Standar Pengelolaan	5,40	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan	6,11	Menuju SNP 4
Rata-Rata Skor	5,06	Menuju SNP 3

Sumber: Olahan Rapor PMP 2017

c. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

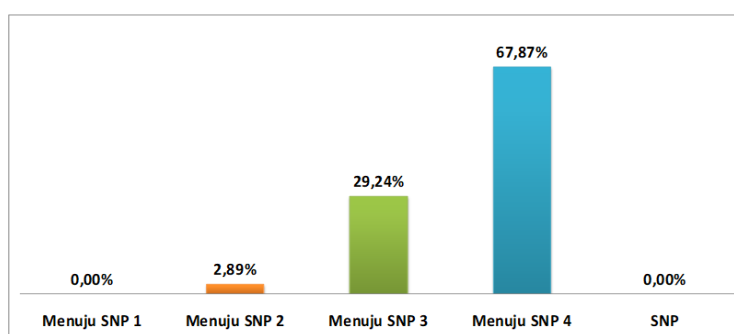
Gambaran umum kondisi pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas :

Tabel 1.15. Skor Peta Capaian Jenjang SMA Provinsi NTB Tahun 2017

Wilayah	Rata-Rata Capaian	Kelompok	Keterangan
Kab. Bima	5,37	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Dompu	5,20	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Lombok Barat	5,17	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Lombok Tengah	5,22	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Lombok Timur	4,87	★★★	Menuju SNP 3
Kab. Lombok Utara	5,03	★★★	Menuju SNP 3
Kab. Sumbawa	5,26	★★★★	Menuju SNP 4
Kab. Sumbawa Barat	5,14	★★★★	Menuju SNP 4
Kota Bima	5,15	★★★★	Menuju SNP 4
Kota Mataram	5,34	★★★★	Menuju SNP 4
NTB	5,15	★★★★	Menuju SNP 4
Nasional	5,14	★★★★	Menuju SNP 4

Sumber: Aplikasi Rapor PMP 2017

Bila dilihat dari perolehan tiap sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan dalam grafik dibawah ini.



Grafik 1.12. Persentase Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP Jenjang SMA Tahun 2017

Sumber: Aplikasi Rapor PMP 2017

Nilai capaian mutu jenjang SMA Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masing-masing standar ditampilkan dalam tabel 1.16 berikut ini.

Tabel 1.16. Nilai Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMA Provinsi NTB Tahun 2017

SNP	Nilai Mutu	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	6,43	Menuju SNP 4
Standar Isi	5,19	Menuju SNP 4
Standar Proses	6,41	Menuju SNP 4
Standar Penilaian	5,78	Menuju SNP 4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,23	Menuju SNP 2
Standar Sarana dan Prasarana	2,78	Menuju SNP 2
Standar Pengelolaan	5,70	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan	5,83	Menuju SNP 4
Rata-Rata Skor	5,17	Menuju SNP 4

Sumber: Olahan Rapor PMP 2017

6. Permasalahan Pendidikan Terkait Penjaminan Mutu

Literasi Membaca

Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ada 4 kriteria untuk capaian literasi membaca satuan pendidikan, **Di atas Kompetensi Minimum, Mencapai Kompetensi Minimum, Di bawah Kompetensi Minimum** dan **Jauh Di bawah Kompetensi Minimum**. Capaian Literasi Membaca untuk jenjang SD, SMP dan SMA untuk Provinsi NTB ditunjukkan oleh tabel 1.17.

Tabel 1.17. Capaian Literasi Membaca untuk jenjang SD, SMP dan SMA untuk Provinsi NTB

Capaian	Deskripsi	Jenjang SD	Jenjang SMP	Jenjang SMA
Di Atas Kompetensi Minimum	Murid di sekolah menunjukkan tingkat literasi membaca yang cakap dan cukup banyak murid berada pada level mahir.			

Mencapai Kompetensi Minimum	Sebagian besar murid telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak murid menjadi mahir		Kota Mataram	
Dibawah Kompetensi Minimum	Kurang dari 50% murid telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca	Kabupaten Bima Kabupaten Dompu Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima Kota Mataram Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten Bima Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima Kabupaten Lombok Utara	Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jauh Dibawah Kompetensi Minimum	Sebagian besar murid belum mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca		Kabupaten Dompu	

Sumber: https://pusmendik.kemdikbud.go.id/profil_pendidikan/profil-wilayah.php/2022

Tabel 1.17. menunjukkan bahwa capaian Literasi Membaca untuk jenjang SD di semua kabupaten di Provinsi NTB secara umum berada pada tingkat **Di bawah Kompetensi Minimum** yang artinya kurang dari 50 % murid telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Capaian yang sama juga ditunjukkan juga untuk jenjang SMP. Hampir semua kabupaten memiliki capaian **Di bawah Kompetensi Minimum**, hanya Kota Mataram yang satuan pendidikannya telah **Mencapai Kompetensi Minimum**. Sedangkan satuan pendidikan untuk jenjang SMP di Kabupaten Dompu, sebagian besar Jauh **Di bawah Kompetensi Minimum** atau sebagian besar murid belum mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Untuk jenjang SMA, capaian literasi membaca berada pada kategori di bawah kompetensi minimum.

Numerasi

Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu

sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Sama halnya dengan Literasi Membaca, terdapat 4 kriteria untuk capaian Numerasi satuan pendidikan: **Di atas Kompetensi Minimum, Mencapai Kompetensi Minimum, Di bawah Kompetensi Minimum** dan **Jauh Di bawah Kompetensi Minimum**. Capaian Numerasi untuk jenjang SD, SMP dan SMA di Provinsi NTB ditunjukkan oleh table 1.18.

Tabel 1.18. Capaian Numerasi untuk jenjang SD, SMP dan SMA untuk Provinsi NTB

Capaian	Deskripsi	Jenjang SD	Jenjang SMP	Jenjang SMA
Di Atas Kompetensi Minimum	Murid di sekolah menunjukkan tingkat numerasi yang cakap dan cukup banyak murid berada pada level mahir.			
Mencapai Kompetensi Minimum	Sebagian besar murid telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak murid menjadi mahir			
Dibawah Kompetensi Minimum	Kurang dari 50% murid telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi	Kabupaten Bima Kabupaten Dompu Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima Kota Mataram Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten Bima Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima Kabupaten Lombok Utara Kota Mataram Kabupaten Dompu	Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jauh Dibawah Kompetensi Minimum	Sebagian besar murid belum mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi			
--	---	--	--	--

Sumber: https://pusmendik.kemdikbud.go.id/profil_pendidikan/profil-wilayah.php/2022

Tabel 1.18. menunjukkan bahwa secara umum capaian numerasi untuk satuan pendidikan di Provinsi NTB cenderung sama untuk ketiga jenjang, baik untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Ketiga jenjang tersebut berada pada kategori Di bawah Kompetensi Minimum.

Indeks Karakter

Indeks karakter menunjukkan tingkat karakter pelajar pancasila yang bersifat holistik mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku. Ada 4 kriteria untuk capaian Indeks Karakter satuan pendidikan: **Membudaya, Berkembang, Perlu Dikembangkan** dan **Belum Terinternalisasi**. Capaian Indeks Karakter untuk jenjang SD, SMP dan SMA di Provinsi NTB ditunjukkan oleh tabel 1.19.

Tabel 1.19. Capaian Numerasi untuk jenjang SD, SMP dan SMA untuk Provinsi NTB

Capaian	Deskripsi	Jenjang SD	Jenjang SMP	Jenjang SMA
Membudaya	Murid secara proaktif dan konsisten menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.			

Berkembang	Murid terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.	Kabupaten Bima Kabupaten Dompu Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima Kota Mataram Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
Perlu Dikembangkan	Murid telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global, namun masih perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.		Kabupaten Bima Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kota Bima Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Dompu	
Belum Terinternalisasi	Murid belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global.			

Sumber: https://pusmendik.kemdikbud.go.id/profil_pendidikan/profil-wilayah.php/2022

Tabel 1.19. menunjukkan bahwa secara umum capaian indeks karakter untuk jenjang SD dan SMA di Provinsi NTB berada pada level yang sama yaitu **Berkembang**. Hal ini berarti bahwa murid terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda halnya dengan jenjang SMP, dari 10 kabupaten terdapat 4 kabupaten pada level Berkembang dan 6 kabupaten, yakni: Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Dompu dan Kota Bima yang berada pada kategori **Perlu Dikembangkan** atau Murid telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global, namun masih perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Survei Lingkungan Belajar

Survei Lingkungan Belajar mengukur aspek-aspek dari sekolah sebagai lingkungan yang mendukung terjadinya pembelajaran. Hal ini mencakup aspek yang secara langsung berkaitan dengan pembelajaran seperti fasilitas belajar, praktik pengajaran, refleksi guru, dan kepemimpinan kepala sekolah. Survei Lingkungan Belajar juga mengukur aspek yang menjadi prakondisi bagi pembelajaran seperti iklim keamanan dan iklim kebinekaan sekolah. Untuk pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar pada jenjang PAUD belum dilaksanakan. Baru dilaksanakan pada jenjang SD, SMP dan SMA. Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Tahun 2021 di Provinsi NTB, maka Hasil Survei Lingkungan Belajar di tiap jenjang adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.20. Hasil Survey Lingkungan Belajar tiap jenjang Provinsi NTB

Indikator	Deskripsi	Hasil Capaian di Jenjang		
		SD	SMP	SMA
Kualitas pembelajaran	Tingkat kualitas interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran	Terarah	Disorientasi	Disorientasi
Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	Tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	Aktif	Pasif	Pasif
Kepemimpinan instruksional	Tingkat kepemimpinan instruksional sekolah yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran	Terbatas	Terbatas	Terbatas
Iklim keamanan sekolah	Tingkat rasa aman dan kenyamanan siswa dari hal rasa aman disekolah, perundungan, hukuman	Waspada	Waspada	Waspada

	fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah			
Iklm Kesetaraan Gender	Dukungan atas kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran publik.	Membudaya	Merintis	Merintis
Iklm Kebinekaan	Iklm kebinekaan menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya dan mengenai komitmen kebangsaan	Merintis	Merintis	Merintis
Iklm Inklusivitas	Iklm inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya	Merintis	Merintis	Merintis

Sumber: https://pusmendik.kemdikbud.go.id/profil_pondidikan/profil-wilayah.php/2022

Potensi

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki potensi yang seyogyanya dimanfaatkan secara maksimal untuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain: pemerintah daerah yang terdiri atas unsur pejabat di lingkungan dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, pengawas sekolah, dewan pendidikan, anggota dewan, BAN-SM dan lain-lain. Disamping itu, teknologi dapat dijadikan sebagai potensi untuk kesuksesan pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara internal potensi yang dimiliki BPMP Provinsi NTB untuk melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan adalah:

1. BPMP Provinsi NTB memiliki sumber daya manusia yang memadai yang bisa diberdayakan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.
2. Telah memiliki hubungan dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
3. Telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

1C Tata Kelola

Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pendidikan, untuk saat ini lebih dari 60% anggaran pendidikan tersebut merupakan anggaran yang dikelola oleh daerah.

Terkait tata kelola organisasi, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Implementasi SAKIP masih terpisah-pisah atau belum terintegrasi.
2. Pemahaman terkait implementasi SAKIP masih belum sepenuhnya dilakukan oleh semua pegawai.
3. Pengukuran kinerja lembaga secara berkala belum dilaksanakan secara maksimal.
4. Pemahaman pola penilaian IKPA dan EKA masih belum maksimal.

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

2A Visi BPMP Provinsi NTB

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) mengemban amanat dalam memajukan pembangunan SDM khususnya pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat melalui usaha bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan, memajukan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. BPMP Provinsi NTB menentukan visi berdasarkan visi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Visi Kemdikbudristek, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045 dalam pencapaian kinerja, potensi dan permasalahan. Adapun Visi BPMP Provinsi NTB Tahun 2020-2024 adalah :

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, mewujudkan visi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen BPMP Provinsi NTB dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia khususnya di Provinsi NTB, sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong. BPMP Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2B Dukungan BPMP Provinsi NTB

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai arahan presiden, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbudristek yang dituangkan juga dalam misi BPMP Provinsi NTB.

2C Tujuan BPMP Provinsi NTB

Perumusan tujuan BPMP Provinsi NTB didasarkan pada tujuan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbudristek yaitu untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Dikarenakan ada perubahan organisasi dari LPMP menjadi BPMP pada bulan Maret 2022, maka rumusan tujuan strategisnyapun mengalami perubahan. Di bawah ini diuraikan tujuan strategis dan indikator kinerja tujuan strategis untuk periode 2020-2021 (periode LPMP) dan periode 2022-2024 (periode BPMP).

Tabel 2.1. Rumusan Tujuan Strategis Periode LPMP Provinsi NTB Tahun 2020-2021

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Target 2021
TS1	Meningkatnya mutu Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.	Persentase Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai kinerja sekolah minimum 75.	27,4
TS2	Menguatnya tata kelola dan system pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Provinsi NTB.	Predikat Sakip LPMP Provinsi NTB.	A

Tabel 2.2. Rumusan Tujuan Strategis Periode BPMP Provinsi NTB Tahun 2022-2024

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Target 2024
TS1	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran.	Persentase Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai kinerja sekolah minimum 75.	75
TS2	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Predikat Sakip BPMP Provinsi NTB.	A

Sesuai dengan kebijakan penyusunan Renstra di lingkungan Kemendikbudristek dan untuk mengetahui *cascading* kinerja yang jelas mulai tingkat Kementerian, unit kerja eselon I, sampai unit kerja eselon II/UPT, maka rumusan tujuan strategis yang ditetapkan BPMP Provinsi NTB diambil

dari salah satu Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP.

2D Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi NTB

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan BPMP Provinsi NTB, diperlukan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) yang akan dicapai pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.3. Program dan Sasaran Program (SP) BPMP Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
TS1	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik Pembelajaran.	SK1 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.	IKK1.1 Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. IKK1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikmas dan Dikmen).
TS2	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran BPMP Provinsi NTB.	SK2 Meningkatnya tata Kelola BPMP Provinsi NTB.	IKK2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi NTB. IKK2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi NTB.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3A Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang diambil haruslah selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek, namun demikian kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Arah Kebijakan BPMP Provinsi NTB :

- 1. Penguatan penjaminan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.*
 - 2. Penguatan tata kelola BPMP Provinsi NTB.*
 - 3. Menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran serta indikator peningkatan mutu satuan pendidikan.*
 - 4. Mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana dengan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri sekolah dalam rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat.*
 - 5. Memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (BPMP, Dinas Pendidikan dan stake holder lainnya) dalam peningkatan mutu pendidikan.*
 - 6. Mendorong penerapan penilaian pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk perbaikan Satuan Pendidikan.*
 - 7. Memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan yang menjangkau seluruh satuan Pendidikan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanpa ada diskriminasi.*
 - 8. Melakukan inovasi penjaminan mutu berbasis teknologi informasi.*
-

Sedangkan strategi merupakan cara yang dilakukan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Strategi berisikan kegiatan indikatif yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target.

Strategi Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi NTB :

- 1. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dengan lebih berkualitas.*
 - 2. Melaksanakan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan secara efektif dan efisien.*
 - 3. Melakukan Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat yang bermutu dan bermanfaat.*
 - 4. Menjalin kerjasama dan kemitraan yang lebih kuat kepada stakeholders penjaminan mutu pendidikan.*
 - 5. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan.*
 - 6. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat secara berkala.*
-

Berikut kebijakan dan strategi yang diambil BPMP Provinsi NTB untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran selama periode 2020-2024.

Strategi Penguatan Tata Kelola BPMP Provinsi NTB :

- 1. Melaksanakan urusan administrasi BPMP Provinsi NTB secara efektif, efisien dan Akuntabel.*
 - 2. Melaksanakan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran.*
 - 3. Melaksanakan reformasi birokrasi.*
-

3B Kerangka Regulasi

Regulasi yang menjadi dasar hukum keberadaan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

Kerangka regulasi lain yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan:

1. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
2. *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;*
3. *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;*
4. *Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;*
5. *Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;*
6. *Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;*
7. *Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*
8. *Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.*

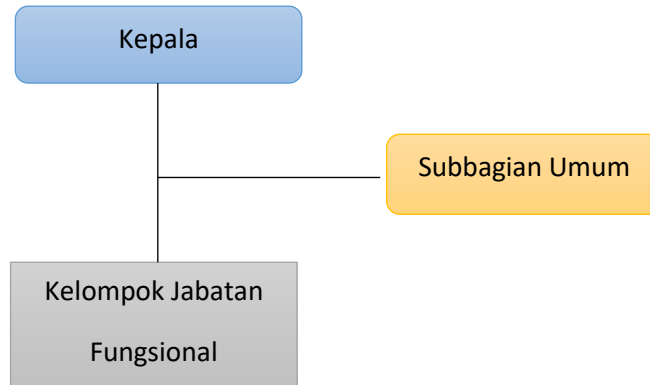
3C Kerangka Kelembagaan

BPMP Provinsi NTB harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi serta terwujudnya reformasi birokrasi yang baik secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi.

1. Struktur Organisasi

BPMP Provinsi NTB adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah setingkat eselon III.

BPMP Provinsi NTB dipimpin oleh seorang kepala, dengan dibantu oleh Kepala Subbagian Umum selaku pejabat eselon IV. Dengan struktur organisasi BPMP Provinsi NTB adalah seperti yang tergambar sebagai berikut:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi BPMP Provinsi NTB

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP Provinsi NTB mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Tugas BPMP Provinsi NTB :

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

Fungsi BPMP Provinsi NTB :

- 1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;*
 - 2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;*
 - 3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;*
 - 4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;*
 - 5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;*
 - 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan*
 - 7. Pelaksanaan urusan administrasi.*
-

Tata Nilai BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka mendukung pencapaian Renstra 2020-2024, Kemendikbudristek menetapkan tata nilai ASN BerAKHLAK sesuai Surat Edaran MenPANRB Nomor 20 Tahun 2021 untuk dijadikan dasar dan arah bagi sikap dan perilaku bagi seluruh pegawai Kemendikbudristek termasuk BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama.”

Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTB diharapkan dapat mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi, integritas, nasionalisme, dan berwawasan global. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen dengan pola usulan yang transparan untuk mendapatkan SDM terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPMP Provinsi NTB didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang lainnya. Sumber daya manusia yang dimiliki berjumlah 102 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional/Widyaprada, Pelaksana, dan PPNPN dapat dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel 3.1. Data Jumlah Pegawai Per Jabatan

Status Kepegawaian	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah Pegawai
PNS	Pejabat Struktural	Kepala Balai	1
		Kepala Subbagian Umum	1
	Pejabat Fungsional	Widyaprada Ahli Madya	10
		Widyaprada Ahli Muda	4
	Pelaksana	Pelaksana	54
PPNPN		Satpam	3
		Cleaning Service	29
Total			102

3. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2020-2024

Seiring dengan bertambahnya tugas pokok dan ruang lingkup kerja BPMP Provinsi NTB, maka Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan BPMP Provinsi NTB. Di samping itu, proyeksi kebutuhan ASN juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing fungsi. Tabel berikut menggambarkan proyeksi kebutuhan ASN BPMP Provinsi NTB sampai tahun 2024.

Tabel 3.2. Proyeksi Kebutuhan ASN BPMP Provinsi NTB

Jabatan	Baseline	Proyeksi		
	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pejabat	-	2	2	2
Fungsional	-	14	46	61
Pelaksana	-	54	56	41
Total	-	70	104	104

4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal BPMP Provinsi NTB merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan BPMP Provinsi NTB. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi dan mencegah terjadinya masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai unit kerja yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui penjaminan mutu, peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan. Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme

sumber daya manusia aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan BPMP Provinsi NTB juga merupakan hal yang sangat penting.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di lingkungan BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, yang telah mendapatkan predikat ZI WBK dari Kementerian PAN-RB yang ditetapkan dengan piagam penghargaan pada tanggal 21 Desember 2020, berkomitmen terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meraih ZI WBBM. Upaya tersebut meliputi enam area pengungkit, yakni:

Tabel 3.3. Enam (6) Area Perubahan

No	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan Tahun 2020-2024
1	Manajemen perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>). • Pembentukan Tim Kerja ZI WBK/WBBM • Penguatan nilai integritas, Perubahan pola pikir dan budayakerja • Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan ditetapkannya SK agen perubahan dan <i>role model</i> di lingkungan BPMP Provinsi NTB • Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.
2	Penataan Tata Laksana	Indeks Sistem Perkantoran Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Tata Kelola SPBE. • Penerapan Manajemen SPBE. • Penerapan Layanan SPBE. • Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola BPMP Provinsi NTB
		Indeks Pengawasan kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital). • Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan. • Mengimplementasikan digitalisasi arsip.
		Indeks Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan melalui aplikasi SAKTI, OM SPAN, dll.
		Indeks Pengelolaan Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku. • Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. • Pengembangan proses bisnis instansi dan unit. • Penyelarasan proses bisnis dan POS.

3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan prinsip manajemen ASN secara professional.
		Indeks <i>Merit System</i>	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>.
		Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan ukuran kinerja individu. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala. Penguatan implementasi <i>Reward and Punishment</i> berdasarkan kinerja. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN yaitu SIMPEG, DIKBUDHR, dll Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN. Pengembangan implementasi Manajemen talenta (<i>talent pool</i>) berdasarkan matriks kompetensi pegawai. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN melalui aplikasi HCDP (<i>Human Capital Development Plan</i>).
4	Penguatan Akuntabilitas	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (<i>collaborative and crosscutting</i>). Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil.
		Indeks Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran. Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.
5	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP (Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan implementasi SPIP di lingkungan BPMP Provinsi NTB dengan menetapkan Tim SPI dan SPIP.
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM di lingkungan BPMP Provinsi NTB

			<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengendalian gratifikasi. • Penguatan penanganan pengaduan dan complain. • Penguatan efektifitas manajemen risiko. • Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik , Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan. • Pengembangan dan pengintegrasian system informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan. • Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik. • Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau melalui <i>wa, telegram, zoom, dll</i> • Penciptaan pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti Suling, Silamo, dan Siniar BPMP Provinsi NTB. • Pengembangan sistem pelayanan publik melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) • Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala. • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala. • Mendorong pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. • Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Sumber: Kepmendikbud RI No 1227/M/2020 tentang Peta Jalan (roadmap) Reformasi Birokrasi Kemdikbud 2020-2024.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

4A Target Kinerja.

Dengan adanya perubahan organisasi dari LPMP menjadi BPMP pada bulan Maret 2022, maka rumusan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan mengalami perubahan. Dibawah ini diuraikan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk periode 2020-2021 (periode LPMP) dan periode 2022 - 2024 (periode BPMP).

Tabel 4.1. Target Kinerja LPMP Provinsi NTB Tahun 2020-2021

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
		2020	2021
SK 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan.			
IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75.	%	26,5	27,4
IKK 1.2. Persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.	%	5,00	5,00
IKK 1.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan.	%	95,00	95,20
SK 2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik			
IKK 2.1. Predikat SAKIP LPMP Provinsi NTB.	Predikat	BB	A
IKK 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	Nilai	81	82

Tabel 4.2. Target Kinerja BPMP Provinsi NTB Tahun 2022-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
		2021	2023	2024
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen.				
IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.	%	0,98	1,96	3,92
IKK 1.2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).	%	25,00	30,00	35,00
SK 2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi NTB				
IKK 2.1. Predikat SAKIP BPMP Provinsi NTB.	Predikat	A	A	A
IKK 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	Nilai	83	84	85

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut adalah:

1. Layanan penjaminan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas
 - Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, Dikdas, Dikmen dan Dikmas;
 - Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, Dikdas, Dikmen dan Dikmen;
 - Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, Dikdas, Dikmen dan Dikmas;
 - Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, Dikdas, Dikmen dan Dikmas;
 - Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, Dikdas, Dikmen dan Dikmas;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, Dikdas, Dikmen dan Dikmas.

2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 - Layanan Perkantoran.
 - Layanan Umum.
 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

4B Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan BPMP Provinsi NTB dan sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Kebutuhan pendanaan dibagi ke dalam dua periode yakni:

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan LPMP Provinsi NTB Tahun 2020-2021

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (dalam jutaan rupiah)	
	2020	2021
SK 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan.		
IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75.	4.059,05	3.199,51
IKK 1.2. Persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.		

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (dalam jutaan rupiah)	
	2020	2021
IKK 1.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan.		
SK 2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik		
IKK 2.1. Predikat SAKIP LPMP Provinsi NTB.		
IKK 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	17.624,81	16.059,39

Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan BPMP Provinsi NTB Tahun 2022-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (dalam jutaan rupiah)		
	2022	2023	2024
SK 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan.			
IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.	1.650.050,00	3.067.067,25	3.220.425,00
IKK 1.2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).	4.950.150,00	9.201.201,75	9.661.275,00
SK 2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi NTB			
IKK 2.1. Predikat SAKIP BPMP Provinsi NTB.	375.000,00	426.721,64	450.000,00
IKK 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	14.864.410,00	16.914.574,36	17.758.400,00

Anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan di BPMP Provinsi NTB periode 2020-2024 bersumber dari APBN yang termuat dalam DIPA.

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi NTB Tahun 2020-2024 ini merupakan revisi renstra Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024 sebelumnya yang disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia unggul dan berkarakter.

Revisi renstra ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) Peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen. (2) Penguatan tata kelola BPMP Provinsi NTB yang memiliki mandat melaksanakan layanan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Masyarakat.

Revisi renstra ini menjabarkan visi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTB beserta sasaran program, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran program yang ditargetkan. Dengan demikian Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi NTB ini diharapkan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat yang hendak dicapai pada periode 2020 – 2024 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Selain yang diuraikan di atas, Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi NTB ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, selama lima tahun mendatang yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS DAN PENDANAAN

1. MATRIKS DAN PENDANAAN PERIODE 2020-2021 (PERIODE LPMP)

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		Alokasi (dalam jutaan rupiah)	
			2020	2021	2020	2021
SK 1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan					
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75	%	26,5	27,4	4.059,05	3.199,51
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00	5,00		
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00	95,20		
SK 2.	Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik					
IKK 2.1	Predikat SAKIP LPMP Nusa Tenggara Barat	Predikat	BB	A	17.624,81	16.059,39
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	81	82		

2. MATRIKS DAN PENDANAAN PERIODE 2022-2024 (PERIODE BPMP)

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target			Alokasi (dalam jutaan rupiah)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
SK 1.	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen							
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	0,98	1,96	3,92	6.600.200,00	12.268.269,00	12.881.700,00
IKK 1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	25,00	30,00	35,00			
SK 2.	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat							
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Predikat	A	A	A	15.239.410,00	17.341.296,00	18.208.400,00
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	83	84	85			

LAMPIRAN 2. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

1. IKK PERIODE 2020-2021 (PERIODE LPMP)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Penjelasan	Penanggung Jawab
SK 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang pendidikan					
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	<p>Pada tahun 2020 perhitungan masih menggunakan indeks mutu.</p> <p>Indeks mutu satuan pendidikan merupakan sistem perencanaan manajemen dan penilaian kinerja sekolah yang tersusun dalam empat perspektif (komponen), yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.</p> <p>Baseline data berasal dari nilai kinerja sekolah laman penjaminan mutu pendidikan tahun sebelumnya.</p>	<p>Capaian Indeks mutu berdasarkan perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, 4 perspektif tersebut didapat dari pengisian laman pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id</p> <p>Dengan sistem skor 19,0 – 34,2 sangat rendah 35,2 – 50,4 rendah 51,4 – 65,5 cukup 66,6 – 81,8 sangat tinggi 82,8 – 95,0 sempurna</p> <p>Satuan: % Tipe perhitungan: non kumulatif</p>	<p>Sumber Data: Laman pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id</p> <p>Unit Pelaksana: LPMP</p> <p>*berdasarkan matriks renstra Kemdikbud 20-24 LPMP masih menggunakan indeks mutu</p>	Koordinator Fungsi Kemitraan.
IKK 1.2	Persentase kesenjangan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	<p>Asesmen Kompetensi Minimum adalah jenis asesmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kompetensi minimal siswa dalam bidang literasi, numerasi, dan sains. Kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah. Target pelaksanaan AKM adalah seluruh satuan pendidikan di semua jenjang</p> <p>Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal untuk survey karakter</p> <p>Survey dilakukan pada semua jenjang pendidikan.</p> <p>Survey karakter mengukur: 1) keterampilan sosial-emosional-etis-spiritual, 2) kesejahteraan psikologis siswa dan guru, serta 3) praktik pengajaran/iklim belajar dan iklim sekolah</p> <p>ditetapkan berdasarkan pertimbangan normatif dan praktis sesuai kondisi setiap sekolah atau daerah.</p> <p>AKM baru akan dilaksanakan pada 2021, untuk target 2020 menggunakan Survei Karakter</p>	<p>$\% = (\sum \text{jumlah siswa yg mencapai nilai minimum AKM} + \sum \text{jumlah siswa yg mencapai nilai minimum survey karakter}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti survey AKM} + \sum \text{siswa yang mengikuti survey karakter}) \times 100\%$</p> <p>Satuan: % Tipe perhitungan: non kumulatif</p>	<p>Sumber data: Laporan Hasil Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Laporan Hasil Survei Karakter</p> <p>Unit pelaksana: LPMP, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan Balitbang</p>	Koordinator Fungsi Pemetaan Mutu dan Supervisi
IKK 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	<p>Data pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbudristek yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring melalui laman dapodik.</p> <p>Akurat bila data telah melalui tahap cleansing data (ganda, salah satuan, dsb), persentase diatas rata-rata 95%.</p> <p>Berkelanjutan bila pendataan dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%</p> <p>Terbarukan bila pemutakhiran data dilakukan berkelanjutan dalam jangka waktu yang terus menerus dengan persentase diatas rata-rata 95%</p>	<p>1. akurat: $(\text{jumlah data akurat} / \text{jumlah data}) \times 100\%$</p> <p>2. berkelanjutan: $(\text{jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan} / \text{jumlah satuan pendidikan})$</p> <p>3. terbarukan: $(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$</p> <p>4. $\sum (1+2+3) / 3$</p> <p>Satuan: % Tipe perhitungan: non kumulatif</p>	<p>Sumber data: Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online</p> <p>Unit Pelaksana: LPMP, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin</p>	Koordinator Fungsi Pengembangan Model Pembelajaran.

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Penjelasan	Penanggung Jawab
SK 2. Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik					
IKK 2.1.	Predikat SAKIP LPMP Nusa Tenggara Barat	Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No.88 Tahun 2021, penilaian SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Satuan = Kualitatif (AA, A, BB, B, CC, C, dan D) Rumus: diperoleh langsung dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan Biro Perencanaan Kemendikbudristek	Tipe perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Biro Perencanaan, Kemendikbudristek	Tim SAKIP
IKK 2.2.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.	IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Negara/Lembaga EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya	Tipe perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Aplikasi Om SPAN, Aplikasi SMART	Tim Keuangan

2. IKK PERIODE 2022-2024 (PERIODE BPMP)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Penjelasan	Penanggung Jawab																								
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen																													
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing - masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar	$(\sum \text{satuan PAUD dan Dikmas yang rapor Pendidikan atau survey lingkungan belajar} / \sum \text{satuan PAUD dan Dikmas pada provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan}) \times 100 \%$	Sumber Data: Rapor pendidikan Unit pelaksana: BPMP	Ketua Pokja 1 - 4																								
IKK 1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing - masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya	$(\sum \text{satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor Pendidikannya meningkat} / \sum \text{satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan}) \times 100 \%$ Satuan pendidikan yang dihitung adalah sekolah SD, SMP, SMA, dan SLB	Sumber Data: Rapor pendidikan Unit pelaksana: BPMP	Ketua Pokja 1 - 4																								
SK 2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat																													
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengkhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No.88 Tahun 2021, penilaian SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Nilai SAKIP=[Perencanaan Kinerja]+[Pengukuran Kinerja]+[Pelaporan Kinerja]+[Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah] (Diperoleh langsung dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal Kemendikbudristek, yaitu Ijten Kemendikbud) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>predikat</th> <th>interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90-100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>80-90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>70-80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>>60-70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>>30-50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0-30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	predikat	interpretasi	>90-100	AA	Sangat Memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang	Sumber Data: Laporan hasil evaluasi SAKIP Periode pengumpulan data: Tahunan	Tim SAKIP
Nilai	predikat	interpretasi																											
>90-100	AA	Sangat Memuaskan																											
>80-90	A	Memuaskan																											
>70-80	BB	Sangat Baik																											
>60-70	B	Baik																											
>50-60	CC	Cukup (memadai)																											
>30-50	C	Kurang																											
0-30	D	Sangat Kurang																											
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator: 1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA); 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA).	Nilai Kinerja Anggaran = $[60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$	Sumber Data: Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).	Tim Keuangan																								



**KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



NO
Gratifikasi

**BPMP NTB
MENUJU
WBBM**